



Analisis Faktor Pemicu Terjadinya Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat

Rabi'ah Al'adawiyah¹, Steven Bagus Imanuel², Tiara Suci Puspita³, Wulan Nesti Utari⁴, Yusuf Bachtiar⁵

Universitas Bina Sarana Informatika

Alamat: Jl. Kamal Raya No. 18, RT/RW 06/03, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat 11730

Korespondensi penulis: 63220177@bsi.ac.id

Abstract. Research on the difference between the budget and actual income at the West Lampung District Health Service for 2021-2023 aims to analyze the factors that trigger the difference between what is planned in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the realization that occurs in the field. This difference can affect the SKPD (Regional Work Unit) deficit or Surplus/Deficit-LO (Operational Report), which reflects the extent to which regional revenue and expenditure budget management is running as expected.

Keywords: APBD, Budget Realization, Regional Revenue, Regional Expenditure

Abstrak. Penelitian mengenai selisih anggaran dengan realisasi pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021-2023 bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu perbedaan antara apa yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi yang terjadi di lapangan. Selisih ini dapat berpengaruh pada defisit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Surplus/Defisit-LO (Laporan Operasional), yang mencerminkan sejauh mana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan..

Kata kunci: APBD, Realisasi Anggaran, Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan merupakan isu umum yang dihadapi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Indonesia. Permasalahan selisih anggaran pendapatan yang terjadi antara target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi pendapatan yang dicapai, sering kali berakar dari ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selisih tersebut bisa terjadi dalam bentuk surplus (pendapatan yang lebih tinggi dari target) atau defisit (pendapatan yang lebih rendah dari target). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pemicu terjadinya selisih antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pendapatan pada **Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat**. Selisih antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan dapat memiliki konsekuensi serius, terutama dalam konteks pelaksanaan program-program daerah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik lagi

agar kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan dan dampak positif bagi masyarakat dapat tercapai. Serta pemerintah harus merevisi seluruh strategi perencanaan dan pengawasan anggaran yang Dimana itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. Dengan melibatkan berbagai pihak, memanfaatkan teknologi, serta melakukan evaluasi yang ketat, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Salah satu elemen terpenting dari perencanaan dan pengendalian sebuah daerah yaitu anggaran. Bukan permasalahan yang aneh jika adanya selisih anggaran dan realisasi di daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada kebutuhan, potensi dan kemampuan.(Hasyim Mochtar, 2019). Selain juga melaksanakan program nasional yang diimplementasikan di daerah dengan memperhatikan secara spesifik kebutuhan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Bidang Kesehatan memiliki arah kebijakan yang sangat penting untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menyediakan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Selisih antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan merupakan fenomena penting dalam pengelolaan keuangan, terutama bagi instansi pemerintah dan Perusahaan. Dalam penelitian kasus ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimana memerlukan data dari Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat yang dikumpulkan dari tahun 2021 -2023 .

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah dokumen yang disusun oleh instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat wajib menyusun LKIP yang mencerminkan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan, pencapaian kinerja, serta hasil yang diperoleh sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Anggaran adalah sebuah

instrumen akuntansi yang mendukung manajemen perusahaan dalam merencanakan serta mengawasi operasional bisnis. Anggaran ini menunjukkan bahwa sumber daya yang direncanakan akan dapat diperoleh dan digunakan dalam jangka waktu tertentu (Nurhafid, 2017). Anggaran merupakan pedoman untuk langkah-langkah yang akan dijalankan oleh perusahaan atau organisasi berdasarkan rencana pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang diungkapkan dalam bentuk nilai uang. Anggaran ini disusun secara sistematis menurut klasifikasi tertentu untuk periode waktu tertentu. Menurut (Pinayungan, 2019) anggaran adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan, diungkapkan dalam bentuk unit kegiatan serta nilai uang. Ini mencakup pengembangan dan penerapan tujuan perusahaan, penentuan spesifikasi tujuan, serta perumusan strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, anggaran juga meliputi penyusunan laporan kinerja secara berkala dan perancangan prosedur tindak lanjut. Dari beberapa pengertian-pengertian anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwasannya anggaran adalah rencana yang menetapkan perkiraan seluruh pendapatan dan pengeluaran yang dijalankan selama satu periode (satu tahun kedepan). Dalam bisnis atau organisasi anggaran ini sangat penting dan berpengaruh yaitu sebagai acuan untuk mencapainya suatu tujuan dengan meminimalkan pengeluaran serta menetapkan prioritas pembiayaan dalam sebuah bisnis atau pun organisasi.

Biasanya anggaran ini terdiri dari beberapa jenis yaitu anggaran operasional, anggaran pendapatan, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran kas dll. Dalam pemerintah, anggaran ini dapat menjadi acuan sebagai pemanfaatan dana publik yg efisien.

Dimana anggaran yang disusun dengan pendapatan yang di peroleh ini mencerminkan bahwa perencanaan keuangan ini efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur keuangan dengan hati-hati dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian anggaran ini menjadi indikator penting, dalam kepentingan seluruh masyarakat dan salah satu tanda keberhasilan dalam mengelola keuangan pemerintah. Namun pemerintah juga sering mengalami selisih antara anggaran dan pendapatan, hal ini jika tidak ditangani akan menimbulkan defisit anggaran yang berkelanjutan.

Selisih anggaran, atau yang dikenal sebagai (spending variance), adalah perbedaan antara biaya yang sebenarnya dikeluarkan pada tingkat aktivitas tertentu dengan biaya yang telah dianggarkan untuk tingkat aktivitas tersebut. Varians merupakan alat utama dalam analisis anggaran, yang membandingkan pendapatan atau biaya dalam model anggaran fleksibel dengan hasil yang sesungguhnya. Untuk menghitung selisih anggaran, perlu menunggu hingga akhir periode pelaporan untuk memperoleh hasil sesungguhnya. Setelah itu, data aktivitas relevan dimasukkan ke dalam model untuk menentukan hasil anggaran yang seharusnya. Dengan cara ini, kita dapat membandingkan anggaran dengan hasil yang dicapai. Analisis varians anggaran pendapatan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi pendapatan, kita

dapat mengevaluasi keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi masalah yang ada. Selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan, baik berupa defisit maupun surplus, memberikan informasi penting untuk memperbaiki perencanaan dan pengelolaan pendapatan di masa depan. Biasanya, selisih antara keduanya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) oleh Dinas Kesehatan pemerintah daerah. Informasi mengenai selisih anggaran ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Kinerja pendapatan pemerintah daerah dianggap baik jika mampu menghasilkan pendapatan yang melebihi target anggaran. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan berada di bawah target, maka kinerja tersebut dinilai kurang memuaskan. (JASMINE, 2014)

Dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran, dapat dinilai kinerja Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat.

a. Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat TA 2020 - 2023

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2021	109,558,126,580.00	93,649,623,969.00	15,908,502,611.00
2022	137,227,670,530.00	123,212,834,663.00	14,014,835,867.00
2023	105,944,814,401.00	101,374,495,056.80	4,570,319,344.20
TOTAL	352,730,611,511.00	318,236,953,688.80	34,493,657,822.20

Sumber : (LRA-SPPD-seluruh-OPD-1,23, n.d.)

Berdasarkan data tersebut, bahwa pada tahun 2020 anggaran yang terealisasi mengalami selisih sebesar 15.908.502.611 & tahun 2021 masih mengalami selisih 14.014.835.867 . Tetapi pada tahun 2023 Anggaran dan realisasi mengalami selisih yang kami anggap tidak wajar jika dibandingkan 2 tahun sebelumnya , selisih tersebut hanya 4.570.319.344,20 saja. Sehingga dengan ini maka diperlukannya hasil penelitian analisis belanja pada Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat pada tahun 2020 hingga 2023 supaya apakah anggaran yang terealisasi tersebut sudah baik & berjalan. Dan dalam Pemberitaan adanya Tindakan kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat , masalah tersebut adalah salah satu contoh dari penyalahgunaan anggaran dan sumber daya yang dialami oleh banyak instansi pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun saya tidak memiliki data atau detail terbaru tentang kasus korupsi tertentu di Dinas Kesehatan Lampung Barat setelah batas pengetahuan saya pada tahun 2023. Gambaran umum tentang potensi dan jenis korupsi yang bisa terjadi di sektor kesehatan di tingkat daerah, serta bagaimana kasus-kasus tersebut bisa berdampak.(Tribun, n.d.)

Dalam hal ini jika realisasi lebih rendah dari anggaran, ini bisa menunjukkan bahwa anggaran telah disusun dengan terlalu konservatif atau berlebihan. Artinya, ada lebih banyak dana yang dialokasikan daripada yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, selisih yang lebih rendah dari anggaran dapat dianggap sebagai tanda bahwa pengelolaan sumber daya (seperti pengeluaran) dilakukan

dengan efisien, di mana biaya yang lebih rendah dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas atau output yang diinginkan.(Haque-fawzi et al., 2022)

Dalam Implikasinya anggaran yang lebih besar dari realisasi bisa dianggap positif jika disertai dengan pengelolaan yang efisien, namun jika selisihnya terlalu besar, hal ini bisa menunjukkan bahwa anggaran perlu diperbaiki agar lebih realistis.(Sukatin et al., 2023)

Terjadinya selisih anggaran dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi lainnya seperti Dinas Kesehatan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Selisih anggaran mengacu pada perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi atau pelaksanaan anggaran yang sebenarnya. Selisih ini bisa berupa defisit (realisasi lebih rendah dari anggaran) atau surplus (realisasi lebih tinggi dari anggaran).(Desita, 2021) Berikut adalah beberapa penyebab umum terjadinya selisih anggaran:

1. Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat

- **Proyeksi Pendapatan yang Salah:** Salah satu penyebab utama terjadinya selisih anggaran adalah proyeksi pendapatan yang tidak realistis. Perencanaan yang didasarkan pada proyeksi yang tidak akurat atau data yang kurang tepat, seperti pendapatan pajak atau sumber daya lainnya, dapat menyebabkan anggaran yang lebih tinggi dari yang seharusnya dapat direalisasikan. Misalnya, jika ada proyeksi pendapatan dari sektor pajak daerah yang lebih tinggi dari kenyataan (misalnya, karena turunnya daya beli masyarakat), maka selisih anggaran terjadi.
- **Perubahan Sumber Pendapatan:** Adanya perubahan mendadak dalam sumber pendapatan, seperti pengurangan alokasi dari pemerintah pusat atau penurunan pendapatan dari sektor yang diandalkan, dapat menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan yang direncanakan.

2. Perubahan Kondisi Eksternal

- **Kondisi Ekonomi Makro:** Fluktuasi kondisi ekonomi nasional atau global dapat memengaruhi pendapatan daerah dan menyebabkan selisih anggaran. Misalnya, penurunan perekonomian atau inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi penerimaan pajak dan retribusi.

- **Bencana Alam atau Keadaan Darurat:** Peristiwa besar seperti bencana alam, pandemi, atau kondisi darurat lainnya dapat mengganggu rencana anggaran yang telah disusun, karena beberapa program harus ditunda atau diubah. Sebagai contoh, pada pandemi COVID-19, banyak anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan krisis kesehatan, yang mengakibatkan perubahan anggaran di banyak sektor.
- **Perubahan Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, seperti perubahan regulasi pajak, pengurangan subsidi, atau penyesuaian tarif retribusi, dapat memengaruhi proyeksi pendapatan dan menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi.

3. Keterlambatan dalam Proses Pengadaan dan Realisasi

- **Proses Pengadaan yang Terhambat:** Dalam sektor kesehatan atau pemerintahan, keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa, seperti pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, atau pembangunan fasilitas, bisa menyebabkan pelaksanaan anggaran tertunda. Ketika anggaran yang dialokasikan tidak digunakan tepat waktu atau tidak diserap dengan baik, maka akan terjadi selisih anggaran, yang umumnya berupa surplus (realisasi lebih rendah).
- **Keterlambatan Pengeluaran:** Keterlambatan dalam pencairan dana atau proses administrasi internal di pemerintahan juga dapat menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan rencana, dan akhirnya menyebabkan selisih antara anggaran dan realisasi.

4. Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran

- **Efisiensi Pengeluaran:** Terkadang, selisih anggaran terjadi karena pengelolaan anggaran yang lebih efisien dari yang diperkirakan. Sebagai contoh, jika pemerintah daerah dapat menekan biaya melalui pengelolaan yang lebih baik, atau terjadi penghematan dalam program-program tertentu, maka pengeluaran yang lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan dapat terjadi. Hal ini bisa mengarah pada surplus anggaran.
- **Pengurangan Belanja Tidak Prioritas:** Pada beberapa kesempatan, jika terjadi peninjauan dan pengurangan anggaran untuk program-program yang tidak terlalu

penting, hal ini bisa menyebabkan surplus anggaran. Misalnya, program atau kegiatan yang tidak mendesak atau yang tidak dilaksanakan dapat mengurangi pengeluaran dan menghasilkan surplus.

5. Ketidaksesuaian Antara Anggaran dan Kebutuhan Realistis

- Anggaran yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan: Ketidaksesuaian antara apa yang dianggarkan dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan dapat menyebabkan selisih anggaran. Kadang-kadang, kebutuhan yang muncul selama pelaksanaan anggaran tidak tercermin dengan tepat dalam dokumen perencanaan anggaran, yang menyebabkan adanya kekurangan atau kelebihan anggaran.
- Perubahan Kebutuhan Lapangan: Dalam beberapa kasus, program atau kegiatan yang sudah direncanakan harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yang berubah. Misalnya, pada sektor kesehatan, perubahan kondisi epidemiologis atau kemajuan teknologi dalam perawatan kesehatan bisa mempengaruhi kebutuhan anggaran yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dianggarkan sebelumnya.

6. Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian Internal

- Kurangnya Pengawasan Anggaran: Pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan anggaran seringkali menyebabkan penyimpangan yang tidak terdeteksi selama proses. Jika pengawasan anggaran tidak optimal, maka perencanaan dan pelaksanaan anggaran bisa menyimpang dari rencana awal, menyebabkan penggunaan anggaran yang tidak efisien atau penggunaan anggaran yang berlebihan.
- Penyalahgunaan Anggaran: Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan anggaran oleh pejabat atau pengelola anggaran bisa menyebabkan selisih yang tidak terdeteksi. Hal ini sering kali melibatkan pengalihan dana, mark-up biaya, atau penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan yang ditetapkan.

7. Proses Administrasi yang Rumit

- Prosedur Administrasi yang Tidak Efisien: Prosedur yang rumit dalam pencairan anggaran, pengalokasian dana, atau pelaporan anggaran sering menyebabkan keterlambatan dalam penggunaan dana dan mengarah pada surplus anggaran.

Terkadang, masalah administrasi ini terkait dengan sistem yang tidak terintegrasi, kurangnya SDM yang terlatih, atau adanya birokrasi yang berbelit-belit.

- Kesalahan Administratif: Kesalahan dalam pencatatan atau laporan keuangan, seperti kesalahan dalam penghitungan anggaran atau penyusunan laporan keuangan yang tidak akurat, juga dapat menyebabkan selisih antara anggaran yang ditetapkan dan yang direalisasikan.

8. Perubahan dalam Kebutuhan atau Prioritas Daerah

- Perubahan Prioritas Program: Pada tingkat daerah, perubahan dalam prioritas pembangunan atau kebijakan daerah bisa menyebabkan pengalihan anggaran dari satu program ke program lainnya. Jika perubahan ini tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, hal itu bisa menyebabkan selisih anggaran yang besar antara anggaran yang ditetapkan dan yang direalisasikan.
- Pemotongan atau Penambahan Anggaran Secara Tiba-Tiba: Kadang-kadang pemerintah daerah atau pusat melakukan pemotongan anggaran atau penambahan anggaran secara tiba-tiba tanpa melakukan penyesuaian yang tepat, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi di lapangan.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor pemicu terjadinya selisih anggaran dengan realisasi pendapatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa selisih anggaran ini disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Seperti :

1. Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat
2. Ketidakpastian Ekonomi dan Sosial
3. Faktor Administratif dan Teknis

Secara keseluruhan, untuk mengurangi selisih anggaran yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, penting untuk memperbaiki mekanisme perencanaan anggaran, pengawasan, serta pelaksanaan program dengan lebih efisien dan transparan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi dalam proses administrasi anggaran dapat membantu

mencapai keseimbangan yang lebih baik antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Desita, Y. A. (2021). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Haque-fawzi, M. G., Iskandar, ahmad syarief, Erlangga, H., Nurjaya, Sumarsi, D., & I. (2022). STRATEGI PEMASARAN Konsep, Teori dan Implementasi. In *Pascal Books*. <http://repository.ibs.ac.id/id/eprint/4973>
- Hasyim Mochtar. (2019). Bongaya Journal of Research in Management. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2(1), 1–10.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 80–92.
- LRA-SPPD-seluruh-OPD-2021. (n.d.). 22.-LRA-SPPD-seluruh-OPD-2021 (1).pdf (p. 2021).
- Nurhafid, A. (2017). Penyusunan Anggaran dan Realisasinya. *STIE Ekuitas*, 10–27.
- Pinayungan. (2019). Penganggaran sebuah perusahaan. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. In *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- Tribun. (n.d.). *No Title*. https://www.Tribunnews.Com/Nasional/2023/04/17/14-Tahun-Jadi-Kadinkes-Lampung-Gaya-Hidup-Reihana-Disorot-Pernah-Terseret-Kasus-Korupsi#google_vignette.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/04/17/14-tahun-jadi-kadinkes-lampung-gaya-hidup-reihana-disorot-pernah-terseret-kasus-korupsi>